



## Pascapelantikan Kepala Daerah Baru Pemda DIY Bicarakan Program Strategis

**YOGYA, TRIBUN** - Hari ini pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo dihadiri sekitar 500 undangan. Pelaksanaan pelantikan dilakukan di Bangsal Kepatihan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bagian Protokol Biro Umum dan Protokol Setda DIY, RM Tejo Purnomo.

"Jadi nanti ada pengambilan

sumpah, pelantikan, penempatan tanda jabatan dan pangkat. Sertijab (serah terima jabatan) bisa dilakukan setelahnya di daerah masing-masing. Tapi untuk pelantikannya di pemerintah provinsi," bebernya, ketika ditemui di Ruang Rapat Biro Umum dan Protokol Setda DIY, tempo hari.

Tejo menerangkan bahwa pelantikan tersebut berbeda dengan pelantikan untuk pejabat struktural. Pejabat struktural yang dilantik akan langsung menandatangani berita acara saat itu juga, namun hal tersebut tidak berlaku untuk

wali kota dan bupati yang akan dilantik.

"Tentunya sudah pernah dilantik (karena petahana). Kalau dulu masih di rapat istimewa paripurna (pelantikannya). Tapi beberapa kali ada pelantikan PLT (Pelaksana Tugas), jadi sudah paham," urainya.

Terkait pakalan yang akan digunakan kepala daerah terpilih, Tejo menjelaskan bahwa pakalan tersebut adalah Pakalan Dinas Upacara (PDU). Pengadaan pakalan tersebut dilakukan di daerah masing-masing.

● ke halaman 14

### Pemda DIY Bicarakan

● Sambungan Hal 13

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Sekda DIY, Rani Sjamsinarsi mengatakan bahwa dengan dilantikannya wali kota dan bupati tersebut akan memudahkan koordinasi terkait sinergitas program provinsi dengan kabupaten/kota

dalam rentang lima tahun ke depan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Tata Ruang yang sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu ketok palu pengesahan, juga masuk di dalam bahan obrolan Pemda DIY dengan dua kepala daerah terpilih tersebut. Misalkan pembicaraan yang menyangkut penataan ruang di kawasan Kota Yogyakarta.

"Di dalam pasalnya jelas tercantum bahwa dalam pengelolaan kawasan strategis bisa dilakukan secara terpadu antara kita (Pemda DIY), Pemkot dan masyarakat," jelasnya.

Rani berharap, titik-titik kawasan strategis ini bisa dapat segera diputuskan. Kawasan itu sendiri meliputi alun-alun, Sewandanan, Kotagede, dan sebagainya agar benar-benar bisa terbagi tugas dan tanggung jawabnya

antara Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta.

"Kalau di dalam Perda-is Tata Ruang ini ada istimewa bagi Kasultanan, sehingga *leading sector* di provinsi. Tapi kita nanti bersama-sama, tidak bisa kami mengelola sendiri, itu tidak bagus. Jadi kita berbagi, tapi berbagi seperti apa agar berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati dengan nyaman dan bersih," ungkapnyanya. (kur)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|--------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005